

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, Surabaya, el-Kaf, 2006
- Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran, Pekanbaru, Unri Press, 2009
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Akil, Standarisasi Manajemen Penyiaran: Mewujudkan Profesionalisme Radio dan TV, Penerbit KPID Sulsel, 2009
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, A.A.N. Ananda Kusuma, Gamantyo Hendratoro, Satriyo Dharmanto, Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia, Jakarta, PT. Multikom, 2003
- Ira Aprilianti dan Siti alifah Dina, Makalah Kebijakan No. 30: Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia, Jakarta, Center for Indonesian Policy Studies, 2021
- J.B, Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, Jakarta, Gramedia, 1994
- Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010
- Mohtar Mas' oed, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2016
- Morissan, Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010

- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993
- , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Puji Rianto, Et.Al, Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan, Yogyakarta, PR2Media-Yayasan Tifa, 2012
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2006
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007
- Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangan, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2021
- Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004,
- Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta, IKAPI DKI Jaya

## **B. Jurnal**

- Agung Prabowo dan Kurnia Arofah, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital”, Jurnal ASPIKOM Vol.3 No.2, 2017
- Ahmad Budiman, “Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia”, Jurnal Politica, Vol. 6 No. 2, 2015
- Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan, Vol. 5, No. , 2018
- Andrew Foster dan Mark R Rozenweig, “Learning by Doing and Learning From Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture”, Journal of Political Economy, Vol.103, No. 6, 1995
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Vol.4 No.2 2000
- Azwar Aziz dan Awangga Febian Surya Admaja, “Evaluasi Penggunaan Frekuensi Pada Penyelenggaraan Radio Komunitas”, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 9 No.3, 2021

- Bayi Priyono, “Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol.8 No.2, 2016
- Darmanto, Daru Nupikso, Ardison, “Peluang dan Hambatan TVRI Sebagai Penyelenggara Multiplexing Opportunities and Obstacles of TVRI as a Multiplexing Operator”, *Jurnal Pekommas*, Vol.7, No.2, 2022:
- Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, Yuni Tresnawati, “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol.17, No.2, 2019
- Gabriella Tumbellaka, “Sanksi Pidana Dalam Penyiaran Audiovisual (Televisi) di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 1, 2014
- Haris H Witharja, Neka Fitriyah, Ail Muldi, “Dampak Kebijakan Analogue Switch-Off (ASO) Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Tata Media Penyiaran Di Indonesia”, *Perspektif Komunikasi*, Vol.7 No.1, 2023
- Jumadal Simamora, Stefani Wahyudi Yuniarso, dan Sigit Pamungkas, “Analisis Faktor Penghambat Analog Switch Off (ASO) Ke Televisi Digital Di Indonesia Dari Perspektif Mediamorphosis” *The Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, No
- Marnia Rani, “Peran Lembaga Penyiaran Televisi Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Selat*, Vol.1 No.2, 2014
- Muhammad Anshar Akil, “Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Nur Malik Maulana, “Menggali Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.17 No.1, 2019
- , Nurul Hasfi, “Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital di Indonesia”, *Jurnal Sositologi*, Vol. 18, No 2, 2019
- Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia Yuridika* , Vol.12 No.5, 1997
- Purwanto, Puji Lestari, Ade Wahyudin, “Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Di LPP TVRI Stasiun Jakarta,” *Jurnal Heritage*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- R. Deiny Mardian, Woro Indah Widiastuty, dan Tjandra Susila, “Kajian Kebijakan Tarif Sewa Kanal Multiplexing Pada Penyelenggaraan Televisi Digital di Indonesia”, *JETri*, Vol. 15, No. 1, 2017

- Rahman Asri, "Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia (Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog ke Siaran Digital)", *Jurnal CommLine*, Vol.8 No.1, 2023
- Ranti Gustriya Rizki, Sunny Ummul Firdaus, "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran yang Bersifat Mengatur", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No.1, 2023
- Redi Panuju, "Problem Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital", *Jurnal Hikmah*, Vol.13 No.1, 2019
- Riani Bakri, Murtir Jeddaw, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Pallangga Praja*, Vol.4, No.2, 2022
- Riza Asmi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Digital Dividend pada Spektrum Frekuensi Radio Televisi Digital", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol.9 No.3, 2011
- Shinta Tomuka, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)", *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2 No.2, 2013
- Syintia Nurfitriya, Muhamad Yusuf dan Ican Mandala, "Migrasi Media Televisi Mainstream Ke Digital: Televisi Lokal Siap Menyambut Analog Switch Off (ASO)", *Komunikasia Journal of Islamic Communication & Broadcasting*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Fiat Justittia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.4, 2014
- Yogi Hadi Ismanto, Hani Usmandani, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.8, 2022
- Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja", *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 1, 2023
- Yulia Emidari dan Harliantara, "Strategi Komunikasi Pemasaran Televisi Lokal JTV dalam Tahap Awal Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)", *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, Vol.6 No.2, 2023

### C. **Aturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan  
Penyiaran

